

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI
KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN**

Nadya Rindayu Farista Fanny

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

nadya.17040674004@mhs.unesa.ac.id

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Pada 2019, program BPNT mulai dilaksanakan di Kecamatan Bancar. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat masalah kartu bantuan milik keluarga penerima manfaat terdaftar yang meninggal, tetapi tercatat masih melakukan pencairan bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program BPNT di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian menggunakan indikator implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri atas sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, standar dan tujuan kebijakan, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis Miles, Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan enam indikator teori tersebut, program BPNT dinilai mampu mengurangi beban pengeluaran KPM. Namun, pada indikator komunikasi ditemukan kendala terkait kurangnya penyampaian dan penyinkronan data antar perangkat di desa yang mengakibatkan data penerima BPNT tidak diperbarui. Pada indikator sikap/kecenderungan para pelaksana sistem *pre order* belum dilaksanakan dengan baik, sedangkan pada indikator sumberdaya, karakteristik organisasi pelaksana, standar dan tujuan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tidak ditemukan kendala. Saran dalam penelitian ini adalah agar tiap kepala desa melakukan peninjauan melalui koordinasi RT dan memperbarui data para penerima bantuan setiap bulan, serta mengoptimalkan pelaksanaan sistem *pre order* yang ada dalam program BPNT.

Kata Kunci : Implementasi, Program, Bantuan Pangan Non Tunai

Abstract

Non-Cash Food Aid is non-cash food social assistance as defined by the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Regulation No. 20 of 2019 on the Distribution of Non-Cash Food Aid. The Bancar District started implementing the BPNT program in 2019. In practice, however, there is a problem with the assistance card belonging to the family of a registered beneficiary who has passed away but is still disbursing help. The goal of this study is to identify and describe the BPNT program's implementation in Bancar District, Tuban Regency. This research takes a qualitative approach while doing descriptive research. The research focuses on Donald Van Meter and Carl Van Horn's policy implementation indicators, which include resources, implementing organization characteristics, communication between implementing organizations, implementer attitudes and tendencies, standards and policy goals, as well as the social, economic, and political environment. Interviews, observation, and documentation are used to acquire data. Miles, Huberman's analysis, which included data gathering, data reduction, data presentation, and drawing conclusions, was used to analyze the data. Based on the

study's six theoretical indications, the BPNT program is thought to be capable of reducing KPM spending. However, communication indicators revealed challenges relating to data transmission and synchronization across devices in the village, which resulted in BPNT recipient data not being upgraded. The pre-order system had not been properly implemented on the indications of implementer behaviour, but there were no impediments on the indicators of resources, characteristics of implementing organizations, standards and objectives, as well as the social, economic, and political environment. The report recommends that each village head perform a review through RT coordination and update beneficiary data every month, as well as optimize the implementation of the BPNT program's pre-order mechanism.

Keywords: Implementation, Program, Non-Cash Food Aid

PENDAHULUAN

Terciptanya masyarakat sejahtera merupakan tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran dan tidak menderita kemiskinan, kelaparan, serta mendapatkan pendidikan, kesetaraan, dan kesehatan yang layak seperti dijelaskan pada buku *Indonesia Macroeconomic Outlook* (2009). Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu mengembangkan diri. Kesejahteraan masyarakat menjadi suatu keadaan yang menunjukkan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan melihat sandang dan pangan tercukupi, memiliki rumah yang layak, mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik, atau dalam keadaan kebutuhan jasmani dan rohani yang cukup (Todaro & Smith, 2006).

Kemiskinan menjadi salah satu faktor tinggi rendahnya kesejahteraan masyarakat negara, termasuk negara Indonesia. Hal tersebut merupakan permasalahan multidimensional yang meliputi kemiskinan dalam dimensi sosial, dimensi ekonomi, politik, dan budaya, dimensi pendidikan, serta perdamaian dunia (Yunus, 2019). Program yang memiliki tujuan untuk mengurangi kemiskinan adalah bantuan sosial pangan yang fokusnya tertuju pada apakah masyarakat mengonsumsi cukup makanan. Jaminan pangan keluarga adalah kemampuan keluarga dan semua anggotanya kapan pun memperoleh cukup makanan untuk kegiatan dan kehidupan mereka yang sehat (Sitinjak & Sihaloho, 2019).

Terdapat 2 dimensi yang dapat mempengaruhi proses pembangunan di Indonesia, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro (Adi, 2003). Dimensi makro mendeskripsikan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh institusi negara melalui peraturan dan kebijakan yang telah dibuat, sedangkan dimensi mikro merupakan proses sebuah pembangunan yang mendapat pengaruh dari individu dan kelompok masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistika, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 4.112,25 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada tahun 2019 mencapai 170.800 jiwa. Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin selama 2017 hingga 2019 di Kabupaten Tuban, dari 16,87% berkurang menjadi 15,31% di tahun 2018, kemudian berkurang menjadi 14,58% di tahun 2019. Berkurangnya tingkat kemiskinan tersebut dapat menjadi keberhasilan dari kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang telah diadakan oleh pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain.

Implementasi kebijakan ialah tahapan penting pada struktur kebijakan yang dapat menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat diterapkan di lapangan dan berhasil menghasilkan *output* serta *outcome* seperti yang ditargetkan. Untuk mencapai *output* dan *outcome* yang telah ditargetkan, maka kebijakan publik perlu diimplementasikan secara maksimal (Sasmito & Nawangsari, 2019).

Van Meter dan *Van Horn* menjelaskan implementasi kebijakan sebagai usaha yang dilakukan organisasi publik untuk meraih tujuan yang ditetapkan sebelumnya (Winarno, 2005). Usaha yang dilakukan dapat berupa mengubah suatu keputusan menjadi tindakan yang operasional untuk waktu tertentu atau untuk melanjutkan usaha serta upaya yang sudah dilakukan sebelumnya guna mewujudkan perubahan kecil maupun besar. Indikator model implementasi ini terdiri dari sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, standar dan tujuan kebijakan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Indikator pada model implementasi *Van Meter* dan *Van Horn* dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber daya

Sumber daya manusia yang berkualitas selalu dibutuhkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Manusia menjadi sumber daya paling penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Oleh karena itu, sebab keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia (Rahmawati et al., 2020). Selain itu, sumber daya finansial juga termasuk penting dalam implementasi suatu kebijakan. Dana dan intensif yang kurang atau terbatas dalam implementasi kebijakan dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

2) Standar dan tujuan kebijakan

Tingkat keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dapat dilihat dari ukuran dan tujuan suatu kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang berada di tingkat pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan sasaran terlalu ideal (utopis), kebijakan menjadi sulit untuk dilaksanakan (Mulyadi, 2017). Untuk menilai kinerja implementasi suatu kebijakan, digunakan standar dan target sasaran yang wajib untuk dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana

Kinerja agen pelaksana sebagai organisasi atau kelompok yang ikut serta dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi penting dalam menyukkseskan jalannya implementasi kebijakan melalui karakteristik yang dimiliki setiap organisasi pelaksana. Kebijakan yang dilakukan sering kali menuntut para pelaksana kebijakan untuk

disiplin dan ketat. Selain itu, organisasi pelaksana yang persuasif dan demokratis juga diperlukan dalam implementasi kebijakan. Penentuan agen pelaksana atau organisasi pelaksana kebijakan dipertimbangkan pada seberapa besar wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan suatu kebijakan.

4) Komunikasi antar organisasi pelaksana

Agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, menurut *Van Meter* dan *Van Horn*, para *implementor* harus dapat memahami standar dan tujuan dari kebijakan tersebut. Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dapat dikomunikasikan dengan baik antar organisasi pelaksana karena pencapaian dari standar dan tujuan dalam implementasi suatu kebijakan merupakan tanggung jawab para *implementor*. Dalam penyampaianya, informasi yang diberikan kepada atau oleh para pelaksana kebijakan harus sama dan konsisten.

5) Sikap para pelaksana

Berhasilnya implementasi suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan. Sikap yang dimaksud ialah apakah para pelaksana menolak kebijakan atau menerima dan mendukung sebuah kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan formulasi kebijakan tidak mengikutsertakan masyarakat setempat yang biasanya lebih mengetahui persoalan dan permasalahan yang dirasakan. Namun, suatu kebijakan bisa bersifat *top down* dimana para pengambil keputusan tidak mengenal atau tidak mengetahui keinginan, kebutuhan, atau permasalahan apa yang harus ditangani.

6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Kondisi lingkungan eksternal sangat berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Kondusif atau tidaknya lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya di suatu tempat menjadi penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga dalam implementasi kebijakan selalu mengupayakan lingkungan yang kondusif di lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Faktanya, beras menjadi komoditi makanan terbesar yang dibutuhkan masyarakat kurang mampu di Indonesia dan dapat meningkatkan angka kemiskinan (Vedy & Juwono, 2020). Kementerian Sosial bekerja sama dengan Perum Bulog dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk keluarga, seseorang, kelompok, atau

masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. (Perpres No. 63 Tahun 2017).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah perubahan dari program subsidi beras sejahtera (Rastra). Dalam Pedoman Pelaksanaan BPNT dijelaskan bahwa BPNT merupakan bantuan sosial pangan dengan bentuk non tunai oleh pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan menggunakan mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) dan Rumah Pangan Kita (RPK) yang bekerjasama dengan Bank penyalur. Dalam pandangan pemerintah, penyaluran bantuan sosial non tunai menggunakan sistem perbankan ditujukan supaya akuntabilitas dan transparansi program dapat ditingkatkan, sehingga dapat memudahkan dalam pengendalian, pemantauan, serta pengurangan penyimpangan (Tangel et al., 2021).

Program BPNT diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. BPNT ditujukan untuk mengurangi tingkat pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberi nutrisi seimbang, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan pangan bagi KPM, memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Yunus, 2019:140). Selain itu, penerapan program BPNT diupayakan untuk membangun sistem perlindungan sosial pangan masyarakat yang kurang mampu.

Besaran bantuan dari BPNT sejumlah Rp.200.000 per KPM untuk setiap bulannya. Bantuan Pangan Non Tunai ini hanya dapat digunakan untuk transaksi sembako yang berupa beras, telur, tahu, dan tempe di e-Warong dan tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai. Jika pada bulan tersebut bantuan tidak ditukarkan oleh KPM, nilai bantuan akan tetap disimpan di akun elektronik BPNT. Untuk mendukung pengelolaan e-Warong, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Tuban melakukan kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara), salah satunya yaitu BNI. Selain itu, Kementerian Sosial dan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), Kube Jasa yang beranggotakan

penerima manfaat, dan pendamping sosial. Untuk dapat melakukan proses transaksi, penerima bantuan harus sudah memiliki Kartu Keluarga Sejahtera elektronik atau Kartu Kombo yang terdaftar agar dapat mencairkan dana tersebut (Annafa'ah & Rahaju, 2018).

Kecamatan Bancar merupakan wilayah yang terletak di Kabupaten Tuban bagian utara dengan luas wilayah 112,36 km². Wilayah sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tambakboyo, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatirogo, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sarang Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban, di Kecamatan Bancar terdiri atas 24 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 61.892 jiwa (Tuban, 2020). Dari sekian banyak jumlah penduduk di Kecamatan Bancar, terdapat 4.920 penduduk yang menerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

Pada tahun 2020, pemerintah Kabupaten Tuban mulai menerapkan *pre order* untuk komoditi beras di Kecamatan Bancar. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dibebaskan untuk memesan dengan memilih kualitas beras, yaitu medium dan premium, sebelum beras disampaikan kepada KPM oleh agen atau dengan kata lain memesan kepada *supliyer* beras melalui agen. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan kualitas yang sering dijadikan masalah oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Disamping itu, di Kecamatan Bancar terdapat masalah mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu terdapat kartu bantuan milik KPM terdaftar yang sudah meninggal dunia cukup lama, tetapi masih melakukan pencairan BPNT. Hal ini tentu tidak dianjurkan sebab dalam realitanya penerima bantuan atau KPM sudah seharusnya tidak dapat menerima bantuan lagi dan dilakukan penggantian. Selanjutnya, berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang disebut pendekatan investigatif, yaitu peneliti

mengumpulkan data secara langsung dan interaksi tatap muka dengan orang-orang di tempat penelitian (Megawati et al., 2020). Fokus penelitian yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan indikator meliputi sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, standar dan tujuan kebijakan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Winarno, 2005). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan objek penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data (Pertiwi & Megawati, 2021). Wawancara merupakan alat untuk pengumpulan data dengan tanya jawab bersama narasumber (Darajah, 2017). *Key informan* wawancara terdiri dari Kepala Bidang Kesra Kecamatan Bancar, agen e-Warong, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dokumentasi merupakan data pendukung supaya penelitian tidak dikatakan subjektif (Hardani et al., 2020). Dokumentasi didapat dari dokumen-dokumen penunjang yang berkaitan dengan implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT. Data dianalisis menggunakan analisis Miles dan Huberman, berdasarkan pada Moleong yang terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Agus et al., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT adalah program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dilaksanakan di Kecamatan Bancar sejak tahun 2019 yang saat itu bertepatan dengan terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia dan Kecamatan Bancar juga menjadi daerah terdampak Covid-19. Berdasarkan data bantuan Kecamatan Bancar tahun 2021, hingga per bulan Juli-September 2021 tercatat 4.920 penerima yang berasal dari 24 desa di Kecamatan Bancar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian hasil dan pembahasan difokuskan untuk analisis implementasi program BPNT dengan model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang indikatornya terdiri dari sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana,

sikap/kecenderungan para pelaksana, standar dan tujuan kebijakan, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang diuraikan sebagai berikut :

1.) Sumber Daya

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 33 ayat (5), tenaga pelaksana BPNT terdiri atas :

1. Koordinator wilayah
2. Koordinator daerah Kabupaten/Kota
3. Pendamping sosial Bantuan Sosial Pangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sumaji, selaku Kepala Bidang Kesra Kecamatan Bancar, dalam implementasi program BPNT terdapat pelaksana yang terdiri atas Seksi Kesra Kecamatan, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyuplai (agen), Agen Laku Pandai, e-Warong, serta agen lainnya yang berada hampir di setiap desa dan telah terdaftar. Dengan sumber daya manusia yang ada, pihak Kecamatan Bancar mampu menangani pelaksanaan program BPNT hingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat penerima bantuan atau KPM.

Sumber daya finansial yang memadai dapat menjadi peluang keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kesra Kecamatan Bancar, sumber daya finansial program BPNT berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran perencanaan Daerah (APBD). Sesuai Permensos RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dijelaskan bahwa sumber pembiayaan operasional BPNT berasal dari APBN, APBD, dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana tersebut kemudian disalurkan menjadi bantuan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) penyalur BPNT. Dengan anggaran sebesar Rp.984.000.000 dianggarkan untuk program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bancar yang kemudian disalurkan melalui Himbara yakni bank BNI.

2.) Standar dan Tujuan Kebijakan

Beras adalah salah satu makanan komoditas yang mempengaruhi garis kemiskinan (Agus et al., 2019). Masyarakat di Indonesia, khususnya di Kecamatan Bancar, menjadikan beras sebagai komoditas sumber pangan yang utama. Berdasarkan hasil observasi, pelaksanaan BPNT di Kecamatan Bancar selalu menggunakan komoditas beras yang

standar kualitasnya baik atau *premium*. Pada setiap bulannya, KPM menerima bantuan melalui rekening Kartu Kombo yang terakumulasi sebesar Rp.200.000 dan dapat digunakan untuk membeli sejumlah komoditi seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Komoditi BPNT di Kecamatan Bancar

No.	Jenis Komoditi	Banyak/jumlah
1.	Karbohidrat (Beras)	15 Kg
2.	Protein hewani (Telur)	1,2 Kg
3.	Protein nabati (Tempe)	4 Biji
4.	Protein nabati (Tahu)	10 Biji

Sumber: Data Transaksi KPM di e-Warong Bapak Djupri, 2021

Standar operasional prosedur program BPNT yang tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yakni :

1. Penetapan pagu/jumlah KPM untuk setiap kab/kota, penyiapan data penerima manfaat, penyiapan e-Warong.
2. Sosialisasi dan edukasi.
3. Registrasi dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
4. Penyaluran dana bantuan melalui rekening bank.
5. Pemanfaatan dana bantuan di e-Warong untuk memperoleh bahan pangan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bancar, standar operasional prosedur tersebut telah diterapkan dengan baik melihat jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Bancar yang sudah terdaftar serta pelaksanaan penyaluran bantuan melalui e-Warong.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 2, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk :

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- b. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT.
- c. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi.

- d. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Hasil observasi dan wawancara di Kecamatan Bancar menggambarkan bahwa tujuan dari program BPNT sudah tercapai sebab kebutuhan pangan KPM BPNT Kecamatan Bancar menjadi tercukupi dan telah mengurangi pengeluaran untuk membeli sembako. Selain itu, pemberian yang selalu tepat sasaran yakni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tepat waktu dalam penyaluran bantuan, tepat jumlah sembako yang diberikan, tepat kualitas sembako yang diterima, tepat harga untuk transaksi pembelian sembako, serta tepat administrasi dalam pengolahan data penerima BPNT menjadikan tujuan program dapat tercapai.

3.) Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam pelaksanaan program BPNT di tingkat Kecamatan Bancar seperti TKSK, Agen Laku Pandai, e-Warong, serta Agen Layanan Keuangan Digital, memiliki karakter disiplin, tegas, baik, edukatif, serta selalu ramah kepada setiap KPM.

Para pelaksana disiplin dalam menyalurkan bantuan sesuai dengan waktunya. Kepala Bidang Kesra Kecamatan Bancar mengatakan biasanya waktu penyaluran bantuan adalah pada pertengahan bulan, yakni kisaran tanggal 11 sampai 13. Selain itu, para agen e-Warong juga melayani masyarakat dengan sangat baik sehingga tidak pernah terjadi antrean yang rusuh atau berebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan agen e-Warong, setiap agen ataupun e-Warong selalu memberikan edukasi kepada KPM mengenai cara penggunaan dan pengamanan PIN Kartu Kombo disetiap kali melakukan transaksi. Hal ini karena mayoritas pemilik Kartu Kombo atau KPM yang melakukan transaksi adalah masyarakat desa yang tingkat penguasaan teknologinya masih rendah. Sehingga hal ini sangat edukatif dan dapat dilakukan secara kontinu untuk menjadikan pengetahuan dan kemampuan teknologi KPM bertambah.

Pemerintah Kecamatan Bancar beserta organisasi pelaksana lainnya selalu bersikap tegas dalam penyaluran program BPNT. Sebelum bantuan disalurkan, Bidang Kesra Kecamatan Bancar bersama TKSK selalu melakukan pengecekan kualitas komoditi. Jika ditemukan kualitas komoditi

tidak sesuai, maka komoditi akan dikembalikan kepada *supliyer* dan meminta kembali komoditi dengan kualitas yang sesuai. Baru selanjutnya, komoditi diserahkan kepada agen e-Warong untuk disalurkan kepada KPM.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, organisasi pelaksana selalu bersikap ramah saat memberikan pelayanan terkait program BPNT kepada masyarakat di Kecamatan Bancar. Para organisasi pelaksana seperti Kesra Kecamatan Bancar, TKSK, dan Agen e-Warong selalu mempersilakan KPM serta melayani kebutuhan KPM dengan baik dan ramah.

4.) Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Selama menjalankan program BPNT agar tersinkronisasi dengan baik, masing-masing pelaksana saling terhubung dengan tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Bidang Kesra Kecamatan Bancar menerima pelaporan data pembaruan atau perbaikan data penerima bantuan setiap bulannya dari masing-masing desa untuk bisa diteruskan kepada Dinas Sosial Kabupaten Tuban. Hal ini dikarenakan terdapat penggantian KPM seperti meninggal dunia, pindah atau tidak ditemukan, menolak menerima bantuan, sudah mampu, dan memiliki kepersetaan ganda. Selain itu, kerap terjadi *error* data penerima KPM sehingga harus dilaporkan untuk perbaikan ke Dinas Sosial. Kesra Kecamatan Bancar juga mengadakan rapat bulanan bersama TKSK untuk membahas terlaksananya penyaluran BPNT dengan mengakumulasi dana yang disalurkan, dana yang ditarik KPM, sisa dana yang masih ada, dan KPM yang belum mencairkan bantuan.

Sesuai hasil wawancara, e-Warong dan Agen Laku Pandai melaporkan setiap transaksi pencairan bantuan dengan mengirimkan data laporan transaksi bulanan yang sudah direkap kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), selaku koordinator. Laporan yang diberikan tersebut berisi jumlah komoditi yang ditarik KPM, jumlah KPM yang melakukan transaksi, serta akumulasi data setiap bulannya dari masing-masing e-Warong dan Agen Laku Pandai.

Tabel 2. Akumulasi Data Transaksi Agen e-Warong

BULAN	Total Komoditi
-------	----------------

5 180 kpm	Beras 2700 kg (per orang 15 kg) Tempe 720 bj (per orang 4 bj) Tahu 1800 bj (per orang 10 bj) Telur 216 pax (per orang 1,2 kg)
6 117 kpm	Beras 1755 kg (per orang 15 kg) Tempe 468 bj (per orang 4 bj) Tahu 1170 bj (per orang 10 bj) Telur 140,4 pax (per orang 1,2 kg)
7 203 KPM	Beras 3045 kg (per orang 15 kg) Tempe 812 bj (per orang 4 bj) Tahu 2030 bj (per orang 10 bj) Telur 243,6 pax (per orang 1,2 kg)
8 204 KPM	Beras 3060 kg (per orang 15 kg) Tempe 816 bj (per orang 4 bj) Tahu 2040 bj (per orang 10 bj) Telur 244,8 pax (per orang 1,2 kg)
9 204 KPM	Beras 3060 kg (per orang 15 kg) Tempe 816 bj (per orang 4 bj) Tahu 2040 bj (per orang 10 bj) Telur 244,8 pax (per orang 1,2 kg)

Sumber : Data Transaksi Agen E-Warong 46 Bulan Mei-September 2021

Namun, pada April 2021, tepatnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Bancar ditemukan kasus penyalahgunaan Kartu Kombo. Salah satu agen e-Warong yang diwawancarai menjelaskan bahwa kartu milik salah satu KPM dipegang oleh Ketua RT yang sekaligus menjadi orang yang melakukan transaksi pencairan bantuan dengan dalih KPM atau pemilik kartu sudah tua sehingga ia membantu untuk mengambilkan BPNT. Setelah beberapa bulan melakukan pencairan, baru diketahui bahwa pemilik kartu sudah lama meninggal. Hal ini menjadi salah karena seharusnya KPM yang meninggal harus dilaporkan kepada kepala desa untuk ditindak lanjuti dan diajukan penggantian KPM ke Dinas Sosial melalui Kecamatan.

Berdasar pada hasil wawancara yang dilakukan, Kecamatan Bancar menilai bahwa kejadian tersebut adalah salah paham dan kurangnya komunikasi antar pihak desa. Akibat kejadian tersebut, Ketua RT yang bersangkutan telah diberi sanksi dicopot jabatannya sebagai Ketua RT oleh aparat desa setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Agen e-Warong, Mbak Kiki mengatakan, “Semena kejadian tersebut, jika ada KPM yang mengambil bantuan pasti saya tanya, apakah bapak/ibu benar pemilik kartu ini sendiri karena kalau bukan, saya tidak bisa melayani. Saya menjadi lebih teliti dan waspada karena bantuan ini juga menjadi tanggung jawab saya sebagai penyalur yaitu Agen e-Warong”, jelasnya. Sesuai hasil observasi dan wawancara di atas menunjukkan bahwa pada indikator komunikasi pelaksanaan BPNT di Kecamatan Bancar telah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat hal-hal yang dievaluasi.

5.) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksana kebijakan memiliki sikap mendukung program Bantuan Pangan Non Tunai dengan melaksanakan setiap tugas dan perannya dengan optimal. Masing-masing pelaksana seperti TKSK, e-Warong, Agen Laku Pandai, hingga perangkat desa terus memfasilitasi masyarakat untuk dapat menerima bantuan. Pada pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Bancar, terdapat sistem *pre order* yang dapat digunakan oleh KPM. Dengan *pre order*, KPM diberikan kebebasan untuk memilih kualitas komoditi yang akan diterimanya pada bulan selanjutnya.

Setelah dilakukan penelitian pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Bancar, ternyata sistem *pre order* yang mulai diterapkan pada tahun 2020 berjalan pada awal-awal diterapkannya saja. Menurut salah satu Agen e-Warong saat diwawancara menjelaskan bahwa pada awal tahun 2020 KPM bisa memesan komoditi sesuai yang diinginkan, seperti bisa memesan beras sesuai dengan kualitas, yaitu medium dan premium. Saat terdapat komoditi buah-buahan KPM juga diberikan pilihan macam-macam buah yang bisa dipesan sesuai permintaan KPM. Namun, seiring berjalannya waktu sistem *pre order* sudah tidak lagi diterapkan. Dengan jenis komoditi yang ada sekarang, kualitas dan kuantitas barang seperti sudah ditentukan dan dibuat seragam, seperti beras dengan kualitas premium yang berarti semua KPM di Kecamatan Bancar mendapatkan komoditi beras dengan kualitas premium. Hal ini menjadi temuan yang dapat menjadi evaluasi dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Bancar. Dengan begitu, para

pelaksana di Kecamatan Bancar belum bisa melaksanakan sistem *pre order* secara optimal.

6.) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bancar, penerapan program BPNT mendapatkan respon penerimaan yang baik di lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Bancar. Banyak masyarakat yang bukan merupakan penerima bantuan atau KPM bersedia mengajukan sebagai agen penyampai atau penyalur BPNT seperti menjadi Agen e-Warong, Agen Layanan Keuangan Digital, dan Agen Laku Pandai yang bekerja sama dengan bank penyalur. Hasil observasi di lingkungan sosial Kecamatan Bancar menggambarkan program BPNT mampu menjadi penyokong kebutuhan ekonomi pangan KPM. Program BPNT juga mampu mendongkrak ekonomi masyarakat yang bukan merupakan penerima bantuan dan memiliki usaha dagang komoditi bantuan sebagai penyuplai komoditi bantuan. Masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian dapat menjadi penyedia komoditi beras, masyarakat yang memiliki usaha peternakan ayam petelur dapat menjadi penyedia komoditi telur, dan masyarakat yang memiliki usaha produksi tahu dan tempe dapat menjadi penyedia komoditi sehingga pendapatan ekonomi masyarakat juga dapat didongkrak dengan adanya program BPNT tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan tentang pelaksanaan program BPNT menjadikan masing-masing kepala desa di Kecamatan Bancar, selaku pelaksana kebijakan memiliki kontribusi dalam mengusahakan warganya untuk mendapatkan kesejahteraan melalui program BPNT. Hal tersebut dilakukan agar periode kepemimpinannya menjadi kepala desa dipandang baik oleh warga dan mendapat dukungan untuk bisa melanjutkan periode kepemimpinan berikutnya dengan lebih baik lagi. Hal ini menunjukkan lingkungan politik yang mendukung program BPNT di Kecamatan Bancar.

SIMPULAN

Melihat pada hasil dan pembahasan tentang implementasi program BPNT di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban yang dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada indikator sumber daya, sumber daya manusia yang terdapat di Kecamatan Bancar dinilai sudah mampu melakukan pelaksanaan program BPNT dengan menyeluruh. Dengan adanya Seksi Kesra Kecamatan, Pendamping

Sosial Program Keluarga Harapan, koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyuplai (agen), Agen Laku Pandai, Agen e-Warong, dan agen lainnya yang ada di setiap desa dapat mendukung keberhasilan implementasi program BPNT di Kecamatan Bancar. Begitu juga sumber daya finansial yang tersedia karena program bantuan hampir selalu dicairkan tepat waktu kepada penerima bantuan.

Dalam indikator standar dan tujuan kebijakan, setiap bulannya KPM menerima BPNT melalui rekening Kartu Kombo yang terakumulasi sebesar Rp.200.000 dan dapat digunakan untuk membeli sejumlah komoditi yang telah tersedia. Kebutuhan pangan KPM Kecamatan Bancar menjadi tercukupi dan telah mengurangi pengeluaran untuk membeli sembako. Pemberian yang selalu tepat sasaran, yakni untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, tepat waktu dalam penyaluran bantuan, tepat jumlah sembako yang diberikan, tepat kualitas sembako yang diterima, tepat harga untuk transaksi pembelian sembako, serta tepat administrasi dalam pengolahan data penerima BPNT menjadikan tujuan dari BPNT dapat tercapai.

Dalam indikator karakteristik organisasi pelaksana, pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Bancar seperti TKSK, e-Warong, Agen Laku Pandai, dan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) memiliki karakter disiplin, tegas, baik, edukatif, serta selalu ramah kepada setiap KPM.

Kemudian, pada indikator komunikasi masing-masing pelaksana saling terhubung dengan tugas dan tanggung jawab untuk selalu melaporkan tahapan pelaksanaan implementasi program BPNT. Namun, masih ditemukan permasalahan akibat kesalahpahaman antar pelaksana kebijakan sehingga menjadikan evaluasi dalam indikator komunikasi dari implementasi program BPNT di Kecamatan Bancar.

Pada indikator sikap/kecenderungan para pelaksana, para pelaksana kebijakan memiliki sikap mendukung program BPNT dengan melaksanakan setiap tugas dan perannya dengan optimal. Sehingga para pelaksana kebijakan selalu ingin memberikan yang terbaik untuk penerima bantuan dengan memberikan kualitas komoditi yang sama, yaitu beras *premium*. Namun, seharusnya penerima bantuan atau KPM tetap dapat melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan mereka. Dengan begitu para pelaksana di Kecamatan Bancar belum

bisa memenuhi hak masyarakat dalam melakukan *pre order* secara penuh.

Dalam indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, program BPNT mendapatkan respon yang baik di lingkungan sosial masyarakat Kecamatan Bancar. Di lingkungan ekonomi program BPNT mampu menjadi penyokong kebutuhan ekonomi pangan KPM dan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat yang bukan merupakan penerima bantuan. Di lingkungan politik, menjadi peluang bagi kepala desa untuk bisa menjadi kepercayaan warganya dalam meningkatkan kesejahteraan warga desa.

SARAN

Saran untuk dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan serta memaksimalkan pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, yaitu :

1. Mempertahankan serta mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia yang tersedia agar lebih maksimal.
2. Mempertahankan ketepatan yang menjadi tujuan dari program BPNT di Kecamatan Bancar.
3. Mempertahankan dan menumbuhkan karakteristik setiap organisasi pelaksana BPNT di Kecamatan Bancar.
4. Perlu dilakukan peninjauan oleh kepala desa melalui koordinasi RT serta memperbarui data para penerima bantuan setiap bulan di setiap desa untuk mengetahui status dan perkembangan penerima bantuan sehingga dapat meminimalisir *error data* yang sering terjadi saat bantuan akan dicairkan.
5. Menumbuhkan sikap atau karakter para pelaksana dengan mempertahankan pelaksanaan sistem *pre order* yang ada dalam program BPNT.
6. Mempertahankan serta selalu menciptakan kondisi lingkungan sosial dan lingkungan politik yang mendukung untuk mencapai kondisi ekonomi yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada :

1. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
2. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu mengarahkan dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
3. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang menilai dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
4. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji yang menilai dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
5. Bapak Sumaji selaku Kepala Bidang Kesra Kecamatan Bancar yang telah membantu proses pengambilan data dalam penyusunan artikel ini.
6. Bapak dan Ibu serta adik-adik saya yang selalu memberikan dukungan moral maupun materiil.
7. Serta pihak-pihak lain yang selalu memberi masukan dan dukungan sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis) Cetakan I*. Lembaga Penerbit FEUI.
- Agus, D., Si, W. M., Endang, D., & Si, M. (2019). Implementation of the Non-Cash Food Aid Program in Social Protection in Gerih District and Geneng District, Ngawi District. *Public Policy and Administration Research*, 9(6), 34–37. <https://doi.org/10.7176/ppar/9-6-04>. (diakses 11 September 2021).
- Annafa'ah, S., & Rahaju, T. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN Siti Annafa ' ah Abstrak. *Jurnal Publika*, 7(8), 24–39. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31619/28685>. (diakses 20 April 2021).
- Darojah, I. Z. (2017). *Analisis Tata Kelola Kebijakan Parkir di Kabupaten Tuban (Studi pada Dinas Perhubungan KABUPATEN Tuban)* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/8641>. (diakses 6 Desember 2020).
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Cetakan I). CV. Pustaka Ilmu. https://www.researchgate.net/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/citation/download. (diakses 17 Desember 2021).
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>. (diakses 13 Oktober 2021).
- Mulyadi, A. (2017). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) KELURAHAN CIKONDANG KECAMATAN CITAMIANG KOTA SUKABUMI IMPLEMENTATION OF NON CASH FOOD HELP POLICY (BPNT) KELURAHAN CIKONDANG KECAMATAN CITAMIANG*. 1–6.
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai 2019.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Pertiwi, M. M., & Megawati, S. (2021). Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya. *Publika*, 9.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 218–231.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>. (diakses 28 Juli 2021).
- Sitinjak, W., & Sihaloho, A. N. (2019). *European Journal of Social Sciences Studies THE HANDLING OF NON-CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) AND ITS EFFECTS ON FOOD RESISTANCE TO BENEFICIARY*

FAMILIES (KPM) IN 2018-2019 - CASE STUDY: SIANTAR SITALASARI DISTRICT , PEMATANGSIANTAR CITY , INDONESIA. 192–199.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3593991>.

(diakses 01 November 2021).

Tangel, N., Mamonto, F., & Kadow, S. R. (2021). Implementation of the Distribution of Welfare Rice Social Assistance for the Poor Southeast Minahasa. *Technium Social Sciences Journal*, 2.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.

Tuban, B. K. (2020). *Kecamatan Bancar Dalam Angka 2020* (L. Kurnianto & U. Ummah (eds.)). BPS Kabupaten Tuban. <https://tubankab.bps.go.id/publication/2020/09/28/aab0c241f8308698245fd6a7/kecamatan-bancar-dalam-angka-2020.html>. (diakses 26 Desember 2021).

Vedy, N., & Juwono, V. (2020). *Analysis of The Implementation of Non-cash Food Assistance (BPNT) Program for Reducing Poverty in Sub-district Panjang, Bandar Lampung 2018*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2019.2299419>. (diakses 11 September 2021).

Winarno, B. (2005). *Analaisis Kebijakan Publik*. Pustaka Belajar.

Yunus, E. Y. (2019). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. *Reformasi*, 9(2), 138. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1454>. (diakses 17 April 2021).

